

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adjie, H., 2008. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Asyhadie, Z., 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Fajar, M., & Achmad, Y., 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fadli Zul, S.H., M.Kn., 2020. *Hukum Akta Notaris*, Penerbit Lingkar Kenotariatan, Jambi.
- Harsono Boedi, 2000. *Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Penerbit Djambatan.
- Koesoemawati, I., & Rijan, Y., 2009. *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta.
- Saputro Anke Dwi, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S., 1986. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, S., 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sulhan, Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, 2018. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Tim Editor anggota AKAPI, 2017. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Penerbit Fokusmedia, Bandung.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Tobing, G.H.S.L., 1999. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*,
Erlangga, Jakarta.

B. Makalah/Jurnal/Artikel/Tesis-Disertasi/Internet

Asshiddiqie, J., 2003. “*Independensi Dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah*”. Jurnal Renvoi, Vol. 3, 31-31.

Endeng, 2019, “*Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang*”, Jurnal Hukum POSTITUM, Vol.4 No.1, 116-134.

Indrasari Esty, 2016, “Sejarah Notariat”,
<https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/sejarah-notariat>, Diakses
pada tanggal 12 September 2020 pukul 01.34 WIB.

Jabadi, K., 2017. “Kajian Yuridis Terhadap Perubahan Daerah Kerja PPAT Di Wilayah Provinsi D.I.Yogyakarta Berdasrak Pasal 12 PP Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah”, *Tesis (tidak diterbitkan)*. Yogyakarta: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Sholiha Mar Atus, 2019, “*Notaris Tidak Memberikan Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Status Objek Tanah Negara dan Mengakibatkan Kerugian Materiil Bagi Pembeli*”, Juranl Media Hukum dan Peradilan, Vol. 5, 62.

Widetya, P.Y.M., 2012. “Kajian Yuridis Tentang Rangkap Jabatan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Tempat Kedudukannya Berbeda Namun Masih Dalam Satu Wilayah Kerja”, *Tesis (tidak diterbitkan)*. Yogyakarta: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1996 Tentang Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Magang, Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor
05/PERKUM/INI/2017 Tentang Rekomendasi Pindah Tempat
Kedudukan dan Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan.

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor
18/PERKUM/INI/2018 Tentang Perubahan Peraturan Perkumpulan
Ikatan Notaris Indonesia Nomor 13/PERKUM/INI/2018 Tentang
Tata cara Pemberian dan Penggunaan Poin.